



# United Nations Human Settlements Programme

Programme des Nations Unies pour les établissements humains

INDONESIA

JL. T.M. Pahlawan No. 3A, Banda Aceh,

Telephone : +62 651 741 2525

Fax : +62 651 25258



UN HABITAT LIBRARY

CLIPPING

Serambi Indonesia, 10 Februari 2006

## Turki Pangkas Kontrak Rumah Waskita 500 Unit Sub Kontraktor Hentikan Pekerjaan

BANDA ACEH - Bulan Sabit Merah Turki akhirnya membatalkan kontrak 500 unit rumah dengan PT Waskita Karya, sebuah badan usaha milik negara yang sudah di-bklklist oleh BRR. Keputusan itu diambil PT Waskita belum mampu menyelesaikan satu unit pun rumah yang diborongnya. Demikian dikatakan Dirut PT Meidiatama Indokonsultant, Ir Nazaruddin, Konsultan Pengawas Pembangunan Bantuan Rumah Turki kepada Serambi, Kamis kemarin.

Dikatakan, pemangkasan 500 unit rumah itu dilakukan Wakil Ketua Bulan Sabit Merah Turki, Dr Nihat Kaya, saat berkunjung ke Banda Aceh, 26 Januari 2006 lalu. Nihat Kaya, kabarnya sangat kecewa ketika melihat dua titik lokasi pembangunan rumah Turki di Kemukiman Lampuuk, Aceh Besar, dan Desa Bitai, Banda Aceh, tidak punya kemajuan berarti. Mengutip pernyataan Wakil Direktur Turkish Res Crescent Society itu, Nazaruddin mengatakan, pengurangan borongan itu dilakukan karena PT Waskita Karya dinilai tak mampu menampakkan kinerja yang bagus. Mengutip kata Nihat Kaya saat bertemu Direksi PT Waskita Karya, kehadiran Turki ke Aceh murni untuk membantu masyarakat yang tertimpa musibah besar. Karena itu, kata Nihat Kaya saat itu seperti dikutip Nazaruddin, Turki berharap bantuan rumah 1.050 unit bisa secepatnya direalisasikan. Tapi karena sampai peringatan 1 tahun tsunami pada tanggal 26 Desember 2005 lalu, PT Waskita belum juga bisa membuat satu unit rumah pun, Turki amat kecewa.

Konsultan Pengawas Rumah Turki itu mengatakan, banyak sebab yang membuat PT Waskita Karya belum mampu memberikan hasil terbaiknya kepada Bulan Sabit Merah Turki. Antara lain, setelah menerima kontrak dari Turki, mereka lalai dengan kewajibannya. PT Waskita Karya, duga Nazar, asyik dengan kegiatan sub-sub rumahnya, sehingga ia lupa dengan kewajiban untuk mempercepat penyelesaian pembangunan. Pada awal penandatanganan kontrak dengan Turki, ungkap Nazar, untuk melaksanakan pembangunan rumah Turki sebanyak 1.050 unit itu, PT Waskita Karya bekerjasama dengan PT Almahdali dari Kota Lhokseumawe. Almahdali diberikan untuk mengerjakan 315 unit rumah dengan harga Rp 82 juta/unit, dari 1.050 unit yang diborongnya dari Turki. Tapi untuk pengusaha lokal, PT Waskita Karya memborongkannya dengan harga Rp 68 juta/unit.

Fahrul, Hasbi, Zulkarnaen, tiga orang dari enam sub kontraktor yang mengerjakan rumah Turki di Desa Bitai kepada Serambi mengungkapkan, pihaknya mau menerima pekerjaan rumah Turki dengan harga Rp 68 juta/unit, karena belum tahu spek rumah yang sesungguhnya. Waktu memberikan sub, PT Waskita Karya hanya memperlihatkan gambar, tidak memperlihatkan spek yang dituntut oleh pihak Turki. Spek rumah Turki itu baru diketahui, ungkap Fahrur, setelah konsultan pengawas rumah Turki, PT Meidiatama menegur dan menunjukkan bahwa pekerjaan rumah yang kami lakukan belum sesuai speknya." Setelah mengetahui itu, kami minta harga borongan rumah ditambah sampai harga Rp 80 juta/unit, jika tidak pekerjaan kami hentikan, dan minta ganti rugi atas pekerjaan yang telah dikerjakan," ujar ketiga sub kontraktor itu.

Sekretaris BRR NAD dan Nias, Ramli Ibrahim mengatakan, sanksi yang diberikan Ketua BRR kepada PT Waskita Karya itu dasarnya sangat kuat, yakni kecewanya Turki kepada kinerja BUMN itu." Sanksi ini akan menjadi pelajaran bagi BUMN lainnya dan kontraktor luar maupun lokal yang menerima pekerjaan rehab dan rekon dari BRR maupun pihak asing, tapi tidak melaksanakannya dengan serius," ujar Ramli Kalangan dunia usaha di Aceh sangat terkejut



## United Nations Human Settlements Programme

Programme des Nations Unies pour les établissements humains

**INDONESIA**

**JL. T.M. Pahlawan No. 3A, Banda Aceh,**

**Telephone : +62 651 741 2525**

**Fax :+62 651 25258**



---

mendengar PT Waskita Karya memborongkan rumah bantuan Turki tipe 45 plus kepada pengusaha lokal dengan harga Rp 68 juta/unit.

“Harga itu sangat rendah dan tidak mungkin pengusaha lokal bisa mengerjakannya sesuai spek standar yang diminta negara donor tersebut,” ujar Ketua Kadin NAD, Firmandez melalui Ketua Kompartemen Konstruksi Kadin NAD, Muhammad Mada kepada Serambi, Rabu kemarin ketika dimintai tanggapannya. Ketua Gepensi NAD, Lukman CM mengatakan, pihaknya sangat prihatin dengan kondisi yang dialami pengusaha lokal yang menerima pekerjaan bantuan rumah Turki tersebut. PT Waskita Karya sebagai BUMN harusnya bisa menjadi pengayom pengusaha di Aceh. Gapensi NAD sangat mendukung kebijakan yang diambil PT Waskita Karya dengan melibatkan kontraktor lokal untuk pelaksanaan pembangunan 1.050 unit rumah bantuan Turki tersebut.” Komitmen itu juga yang membuat PT Waskita Karya bisa menjadi pemenang dalam tender bantuan rumah Turki itu,” ujar Sekretaris Gapensi NAD,” T Alaidinsyah. **(her)**



# United Nations Human Settlements Programme

Programme des Nations Unies pour les établissements humains

## INDONESIA

JL. T.M. Pahlawan No. 3A, Banda Aceh,

Telephone : +62 651 741 2525

Fax : +62 651 25258



Serambi Indonesia, 08 Februari 2006

## Waskita Karya Agenkan Proyek

BANDA ACEH - Badan Pelaksana Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) NAD-Nias, memberikan peringatan keras kepada PT Waskita Karya karena borongan pembangunan rumah untuk korban tsunami di Desa Bitai (Banda Aceh), dan Kemukiman Lampuuk (Aceh Besar), sebanyak 1.050 unit, sempat terlantar. Terakhir diketahui, Waskita hanya menjadi 'agen' proyek itu dengan mesubkannya lagi pada pengusaha lokal, dan memungut fee Rp 20 juta per unit.

Informasi dari berbagai sumber yang diperoleh Serambi, termasuk dari Deputi Prasarana dan Pertanahan BRR NAD dan Nias, Edi Purwanto menjelaskan, pada 25 Oktober 2005 PT Waskita Karya mendapat borongan pembangunan 1.050 unit rumah dari Negara Turki. Rumah tersebut dibangun di dua lokasi, yaitu Desa Bitai, Kecamatan Jaya Baru, Kota Banda Aceh sebanyak 350 unit, dan di Kemukiman Lampuuk, Kecamatan Lhoknga, Aceh Besar 700 unit. Namun kenyataannya, hingga 7 Februari 2006, belum satu unit pun rumah yang selesai dibangun Badan Usaha Milik Negara (BUMN) itu.

Menurut Edi Purwanto, terungkapnya masalah itu setelah pihak pemberi pekerjaan (Turki), melaporkan kepada BRR bahwa hingga akhir Januari 2006, PT Waskita Karya belum menyelesaikan satu unit rumah pun. Dan kenyataan itu sangat memalukan negara Turki yang secara tulus ingin membantu rakyat Aceh korban tsunami.

Dalam laporannya kepada BRR, ungkap Edi, pihak Turki sangat kecewa dengan kinerja PT Waskita Karya, karena pada peringatan 1 tahun bencana gempa dan tsunami 26 Desember 2005 lalu, belum satu unit rumah pun yang bisa diselesaikan BUMN itu. Padahal, pada peringatan 1 tahun bencana tsunami tersebut, pihak Turki mengundag pejabat negaranya menyaksikan, sekaligus meresmikan secara simbolis bantuan rumah untuk korban tsunami di Lampuuk.

"Karena belum satu unit rumah pun selesai, mereka sangat kecewa dengan kinerja PT Waskita Karya," ujar Deputi Prasarana dan Pertanahan BRR itu mengutip pernyataan seorang pejabat senior Turki yang ditugaskan ke Aceh.

Laporan yang disampaikan pihak Turki itu, kata Edi, ditindaklanjuti dengan melihat langsung ke lapangan. Ternyata, fakta di lapangan, dari dua lokasi tersebut, memang belum ada satu unit rumah pun yang selesai. Kalau pun ada satu unit rumah yang sudah selesai, itu adalah rumah contoh yang dibangun sebelum penandatanganan kontrak antara Turki dan PT Waskita Karya pada 25 Oktober 2005. "Yang membangun rumah contoh itu bukan PT Waskita Karya, melainkan rekanan lokal," ujar Edi, kepada Serambi, Selasa (7/2).

Berdasarkan hasil tinjauan lapangan, Tim Pengawas Bapel merekomendasikan kepada Ketua BRR NAD-Nias untuk memberikan peringatan keras kepada PT Waskita Karya. Beberapa sumber lainnya kepada Serambi menyatakan, proyek itu terlantar karena kontraktor lokal tak mampu menyelesaikan rumah Turki itu. Alasannya, dana borongan rumah itu terlalu banyak 'dipotong' oleh Waskita.

Dalam kontrak, harga borongan sebenarnya Rp 86 juta untuk setiap unit rumah tipe 45 plus. Namun, yang diberikan pada kontraktor lokal cuma Rp 68 juta/unit. Artinya, tanpa bekerja, Waskita langsung meraup keuntungan Rp 20 juta per unit, atau hampir Rp 20 milyar.

Imum Mukim Lampuuk, HM Dahlan secara terpisah mengatakan, masyarakat Lampuuk sangat



# United Nations Human Settlements Programme

Programme des Nations Unies pour les établissements humains

## INDONESIA

JL. T.M. Pahlawan No. 3A, Banda Aceh,

Telephone : +62 651 741 2525

Fax : +62 651 25258



kecewa dengan kinerja PT Waskita Karya. Menurutnya, BUMN itu mendapat bayaran yang relatif besar untuk setiap unit rumah tipe 45 plus dari Turki, tetapi hingga 7 Februari 2006 belum satu unit rumah pun yang selesai dibangun. "Beginilah akibatnya kalau penerima pekerjaan berperan sebagai agen proyek," tandas seorang warga korban tsunami.

Pekan lalu, menurut Imum Mukim Lampuuk, pihak Waskita Karya melakukan pertemuan dengan masyarakat Lampuuk. Waktu itu berbagai alasan dilontarkan pihak Waskita Karya menanggapi pertanyaan masyarakat. Pada intinya Waskita Karya menolak tuduhan yang menyatakan mereka lamban.

Masyarakat korban tsunami di Lampuuk maupun di Desa Bitai belum bisa menjawab sampai kapan mereka harus hidup di tenda-tenda darurat dengan kondisi yang semakin memprihatinkan. "Turki sudah membantu secara habis-habisan, nyatanya kami tetap hidup di tenda. Semoga janji Waskita menyelesaikan pekerjaan pada 9 Mei 2006 benar-benar menjadi kenyataan," kata Imum Mukim Lampuuk, penuh harap.

### Memacu kerja

Pinca PT Waskita Karya di Banda Aceh, Ir Sanusi yang dimintai konfirmasinya oleh Serambi, Selasa (7/2) semula enggan memberikan tanggapan dengan alasan pihaknya tidak ingin berkonfrontasi dengan pihak manapun. Tapi setelah mendapat penjelasan dari Serambi bahwa penjelasan itu sangat diperlukan oleh masyarakat, akhirnya Sanusi bersedia bicara.

Sanusi mengakui pihak Turki menuding PT Waskita Karya terlambat menyelesaikan pembangunan rumah untuk korban tsunami (di Lampuuk dan Bitai). Tapi, menurut Sanusi, kontrak penyelesaian rumah itu belum berakhir. Misalnya, kontrak pembangunan 350 unit di Desa Bitai berakhir 9 Maret 2006 mendatang, dan kontrak rumah di Lampuuk sebanyak 700 unit berakhir 9 Mei 2006.

Sanusi mengatakan, pihaknya akan menyelesaikan seluruh rumah yang diborongnya dari Turki sesuai jadwal. Untuk menyelesaikan rumah tersebut, sampai kemarin pihaknya sudah mendatangkan 980 orang lebih buruh bangunan dari Pulau Jawa dengan menumpang pesawat Hercules.

Kebijakan ini diambil setelah sejumlah sub-kontraktor yang diberi kepercayaan untuk mengerjakan rumah bantuan Turki itu tidak mampu menyelesaikan tugasnya sesuai jadwal. Alasan pihak kontraktor yang menerima pekerjaan dari PT Waskita Karya, menurut Sanusi karena sulit mencari tukang yang terampil dan mampu bekerja cepat, dan lambannya suplai sejumlah material ke lokasi pembangunan. **(her/jm)**